

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bab hasil penelitian dan pembahasan telah digambarkan dan dianalisis tentang bagaimana peranan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam mengawasi Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2008. Berdasarkan pembahasan tersebut, penulis membuat kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan. Adapun beberapa kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan melalui peninjauan lokasi Kawasan Bandung Utara untuk menegakkan peraturan daerah harus dilakukan secara berkala dan dilakukan secara aktif
2. Rekomendasi mengenai langkah-langkah konkrit untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat dari DPRD dalam pengelolaan Kawasan Bandung Utara harus tetap dilakukan dan lebih ditingkatkan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pembenahan terhadap pelaksanaan kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat
3. DPRD segera merumuskan pedoman pengawasanyang secara detail menjelaskan mengenai fungsi pengawasan, serta ditingkatkannya kualitas pengawasan seluruh individu di DPRD baik itu unsur pimpinan maupun anggota, sehingga pengawasan

secara individu maupun institusi yang objektif, produktif dapat terwujud.

4. DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera merumuskan Anggaran khusus untuk alokasi pembelian Lahan di beberapa titik Kawasan Bandung Utara yang sudah terlanjur digunakan oleh warga atau lahan usaha pengembang yang dianggap melanggar Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008, Sehingga lahan yang sudah dibeli dapat dijadikan sebagai Lahan terbuka hijau sebagai daerah resapan air.
5. DPRD provinsi Jawa Barat untuk menginisiasi Revisi peraturan daerah nomor 1 tahun 2008 yaitu dalam memberikan Izin mendirikan bangunan di wilayah Kawasan Bandung Utara harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi agar tidak terjadi Tumpang tindih dalam kewenangan dalam memberikan Izin mendirikan bangunan yang mana Kawasan Bandung Utara dibagi menjadi 4 wilayah administrasi yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

## **B. Saran**

Dari hasil kesimpulan yang telah disajikan di atas, pada bagian ini penulis memberikan saran-saran sebagai masukan atau pertimbangan bagi DPRD Provinsi Jawa Barat yang mungkin bermanfaat untuk membantu memudahkan pelaksanaan Fungsi pengawasan DPRD jika

pada peraturannya dibuat lebih jelas dalam mengatur ketentuan yang berlaku. dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. segera membuat peraturan daerah tentang penataan ruang kawasan strategis provinsi Kawasan Bandung Utara termasuk sanksi jika terjadinya pelanggaran
2. Harus mengusulkan peraturan Gubernur tentang moratorium izin pembangunan di Kawasan Bandung Utara.
3. Melakukan audit tata ruang pada izin-izin pembangunan di Kawasan Bandung Utara.
4. Meningkatkan partisipasi kolektif dalam pemanfaatan kawasan Bandung utara dengan menciptakan forum komunikasi untuk mendorong lembaga Eksekutif, masyarakat dan LSM ikut aktif dalam proses perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pembangunan di kawasan Bandung utara

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Boboy, Max. 1994. *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tata Negara*, Jakarta : Penerbit Sinar Harapan.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Edisi *Revisi Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cipto,Bambang. 1995. *Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Jakarta : Penerbit Rajawali Press.
- Darmawan, Cecep. 2009. *Pemberdayaan dan Kinerja DPRD*. Bandung : Penerbit Pustaka Aulia Press.
- Diharna. 1991. *Pemeriksaan Dalam Pengawasan*.Bandung : Penerbit Rosada Karya
- Effendi Sofian. 1988. *Metode Penelitian Survei*.Yogyakarta : Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Gaffar, Afan. 2002 *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Handyaningrat, Soewarno.1980. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*. Jakarta : Penerbit CV Haji Masagung.
- Hasibuan, S P Malayu, 1996, *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, Jakarta; PT.Gunung Agung
- Nawawi, Hadari. 1989.*Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nazir, Muhamad. 1998, *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan Dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo.
- Manan, Bagir. 2004. *Perkembangan Undang-undang Dasar 1945*.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Manullang. 1985. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Sarundajang, Harry. 2001 *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta Erlangga.
- Sarwoto. 1986. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia
- Sanit, Arbi. 1998. *Perwakilan Politik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian P. Sondang. 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta: PT Asdi Mahastya
- Silalahi, Ulbert, 1992. *Studi Ilmu Tentang Admoinistrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru.
- Situmorang, Viktor. 1998. *Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Grafindo.
- Sujamto. 1987. *Aspek- aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta : penerbit Sinar Grafika
- Sukanto, Soerjono. 1992 *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta UI.
- Sumahdjono, Maria SW. 1989 *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada,
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Bandung : Penerbit Ramadan.
- Syafii, Inu Kencana. 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, 1988, *Manajemen Pembangunan*, Jakarta : Haji Masagung
- Winardi, 1997, *Asas-Asas Manajemen*, Bandung : Alumni
- Yandianto. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit M2S.
- .
-

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 & Nomor Tahun 2008 tentang  
Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan kedudukan  
MPR DPR, DPD dan DPRD

Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2008 tentang Pengendalian  
pemanfaatan ruang Kawasan Bandung Utara

Sumber lain ;

Internet [Tarungnews.com](http://Tarungnews.com)